

# RENCANA AKSI

20  
22

Sekretariat Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



# PENGANTAR SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL



Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan

**Dr. Drs. Sugeng  
Priyanto, M.Si**

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang memuat, tujuan, sasaran dan jadwal secara terkoordinasi, sebagai pedoman untuk melaksanakan semua Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi ini merupakan *Road Map* (Peta Jalan) sebagai upaya pencapaian keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi tahun 2022 ini diharapkan adanya optimalisasi peran Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

# PENDAHULUAN



## MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 merupakan dokumen rencana aksi memuat penjabaran dari Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan yang akan digunakan dalam upaya mencapai sasaran program dan kegiatan yang didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.6/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.
- Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.88/SET.10/PROEV/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

# RENCANA AKSI



Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Program yang didukung oleh Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK adalah Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

**Kegiatan** : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK

**Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Satuan
Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	76	Poin
Level Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	3	Level
Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1	Laporan

Sedangkan *output* untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target Output Kegiatan 2022

Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO)	Rincian <i>Output</i> (RO)	Target 2022	Satuan
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		12	Layanan
	994. Layanan Perkantoran	6	Layanan
	996. Layanan Umum	6	Layanan
EBB. Layanan Sarana Internal		1	Unit
	951. Layanan Sarana Internal	1	Unit

Untuk Tahun 2022, sesuai dengan susunan organisasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen Gakkum LHK terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama teknik, serta Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Tiap bagian memiliki indikator unit kegiatan tersendiri dengan target untuk tahun 2022 seperti disajikan berikut.

Tabel 2.2. Unit Kegiatan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik 2022

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2022	Satuan
Tersedianya dokumen rencana program Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RENJA Ditjen Penegakan Hukum LHK	1	Dokumen
	Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Aksi	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Revisi Renstra Ditjen Gakkum LHK	1	Dokumen
	Jumlah dokumen Revisi Renstra Unit Kerja	10	Dokumen
Tersedianya dokumen anggaran Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen RKAKL	6	Dokumen
	Jumlah dokumen revisi RKAKL	12	Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1	Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1	Dokumen
Terselenggaranya dukungan program dan anggaran Gakkum LHK	Jumlah bahan kerja pimpinan Gakkum LHK	12	Laporan
	Raker Penegakan Hukum	2	Laporan
Tersedianya dokumen pelaporan lingkup Ditjen Gakkum LHK	Jumlah dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	Dokumen
	Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup Ditjen Gakkum LHK	10	Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Tahunan lingkup Ditjen Gakkum LHK	11	Dokumen
Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	100	Berita
	Jumlah media kampanye/pameran Penegakan Hukum LHK	10	Pameran
Tercapainya data dan informasi penegakan hukum	Jumlah satuan kerja yang tekoneksi dengan sistem data dan informasi terpusat	5	Satuan Kerja
	Jumlah publikasi melalui media sosial Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Youtube, dan Website)	500	Posting

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2022	Satuan
Tersedianya aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	2	Dokumen
	Jumlah NSPK	1	Dokumen
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum Ditjen Gakkum LHK	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	4	Dokumen
Tersedianya Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum	4	Dokumen Putusan
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Penegakan Hukum LHK	Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri terkelola	16	Dokumen/draft kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	2	Dokumen/draft kerjasama

Tabel 3.4. Unit Kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2022

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2022	Satuan
Meningkatnya efektivitas administrasi keuangan	Opini WTP untuk laporan keuangan	1	Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10	Orang
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan	Identifikasi register asset secara elektronik	1	Dokumen
	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.365	Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1	Dokumen SK
	Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK	1	Dokumen
	Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas	1	Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Laporan
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Ditjen Gakkum LHK	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam mendukung penegakan hukum LHK	785	Orang
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan pengawasan lingkungan hidup	188	Orang
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan penyidikan	266	Orang
	Jumlah sumber daya manusia Penegakan Hukum LHK yang meningkat kompetensinya	1.492	Orang
Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien	Terlaksananya penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup Ditjen Gakkum LHK	1	Dokumen

# PENUTUP



Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 memuat komitmen dalam upaya mencapai sasaran program dan kegiatan dalam mendukung tema pembangunan nasional Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural khususnya di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Aksi ini menjadi panduan dalam upaya pencapaian kinerja dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi di tahun yang mengawali tata kelembagaan baru di Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang selanjutnya tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



# LAMPIRAN

# PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Kedua,**  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

**Pihak Pertama,**  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum LHK

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
NIP. 19630705 198303 1 001

# PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76 Poin
		Nilai Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Anggaran

Rp. 58.189.649.000,-

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Kedua,**  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP 19660711 199203 1 018

**Pihak Pertama,**  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum LHK

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si  
NIP. 19630705 198303 1 001

# RENAKSI SETDITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK



## Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Gakkum LHK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Target PK	Satuan
			TW1	TW2	TW3	TW4		
		Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	-	-	-	76	76	Poin
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Gakkum LHK	Level Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	-	-	-	3	3	Level
		Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK yang tertib dan Akuntabel	-	-	-	1	1	Laporan

# RENAKSI SETDITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK



## Rencana Aksi Dukungan Manajemen Ditjen Gakkum LHK (dalam Ribu Rupiah)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target 2022	TW1	TW2	TW3	TW4	Anggaran 2022
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 Layanan					
	994. Layanan Perkantoran	6 Layanan	40.000.000	85.000.000	125.000.000	163.501.128	163.501.128
	996. Layanan Umum	6 Layanan	5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.595.547	19.595.547
EBB. Layanan Sarana Internal		1 Unit					
	951. Layanan Sarana Internal	1 Unit	682.103	1.793.426	3.091.681	3.825.400	3.825.400
Total			45.682.103	96.793.426	143.091.681	186.922.075	186.922.075

## Rencana Aksi Dukungan Manajemen lingkup Sekretariat Ditjen Gakkum LHK (dalam Ribu Rupiah)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target 2022	TW1	TW2	TW3	TW4	Anggaran 2022
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		2 Layanan					
	994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	12.096.217	22.093.319	30.949.420	39.768.702	39.768.702
	996. Layanan Umum	1 Layanan	4.205.422	7.805.760	11.204.078	14.595.547	14.595.547
EBB. Layanan Sarana Internal		1 Unit					
	951. Layanan Sarana Internal	1 Unit	682.103	1.793.426	3.091.681	3.825.400	3.825.400
Total			16.983.742	31.692.505	45.245.179	58.189.649	58.189.649